

Penguatan Peran Komite Sekolah dalam Kemitraan Sekolah dan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan

Abdulloh¹, Prayudi Kumala², Mundirol Lailatul Muawaroh³, Naili Romah⁴

^{1,4}IAI YPBWI Surabaya

²STEI WaliSongo Sampang

³UIN Sunan Ampel Surabaya

¹abdie649@gmail.com

²prayudikumala88@gmail.com

³elapersia7@gmail.com

⁴nelly.raf@gmail.com

ABSTRACT

This community service program aims to strengthen the strategic role of School Committees in fostering a harmonious partnership between schools and communities in Bangkalan Regency. The background of this activity lies in the limited understanding and involvement of school committees in improving the quality of educational services. The program was implemented through several stages, including preparation, workshops, focus group discussions (FGD), mentoring, and evaluation. The results indicate a significant improvement in the knowledge, skills, and attitudes of committee members regarding their roles as advisory, supporting, controlling, and mediating agencies in accordance with Ministerial Regulation No. 75 of 2016. Furthermore, the program encouraged local-based partnership innovations and established the Bangkalan School Committee Communication Forum (FK2S) as a platform for synergy and best practice sharing among schools. Strengthening the capacity of school committees has proven effective in enhancing transparency, accountability, and community participation in educational management while reinforcing the local cultural value of huyula (mutual cooperation) in school funding. Therefore, this initiative contributes substantially to developing participatory, inclusive, and sustainable education governance at the local level.

Keywords: School Committee, School-Community Partnership, Empowerment, Community Participation, Community-Based Education

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat peran strategis Komite Sekolah dalam membangun kemitraan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Latar belakang kegiatan ini adalah masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan komite sekolah dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahapan persiapan, pelatihan (workshop), Focus Group Discussion (FGD), pendampingan, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman, kemampuan, dan sikap anggota komite terhadap peran mereka sebagai *advisory, supporting, controlling, dan mediating agency* sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Selain itu, kegiatan ini berhasil mendorong lahirnya inovasi kemitraan berbasis potensi lokal serta terbentuknya Forum Komunikasi Komite Sekolah (FK2S) se-Kabupaten Bangkalan sebagai wadah sinergi dan berbagi praktik baik antar sekolah. Penguatan kapasitas komite sekolah terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, serta memperkuat budaya gotong royong (*huyula*) dalam pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, kegiatan ini

berkontribusi nyata terhadap terwujudnya tata kelola pendidikan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan di daerah.

Kata kunci: *Komite Sekolah, Kemitraan Sekolah dan Masyarakat, Pemberdayaan, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Berbasis Komunitas*

A. INTRODUCTION

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses belajar mengajar di dalam kelas, tetapi juga oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pendidikan di sekolah (Nababan et al., 2023). Dalam konteks tersebut, komite sekolah memiliki peran strategis sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, lembaga ini berfungsi sebagai badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah diharapkan dapat berperan sebagai advisory agency (pemberi pertimbangan), supporting agency (pendukung), controlling agency (pengontrol), dan mediating agency (mediator) antara sekolah dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, peran komite sekolah di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Bangkalan, masih belum dioptimalkan (Permendikbud RI No 75, 2016).

Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain rendahnya pemahaman anggota komite sekolah terhadap fungsi dan tugasnya, kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat, serta masih terbatasnya kemampuan komite dalam merancang dan melaksanakan program kemitraan. Kondisi ini mengakibatkan kontribusi masyarakat terhadap pengembangan sekolah belum terkoordinasi secara efektif. Akibatnya, potensi dukungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terhadap pendidikan belum termanfaatkan secara maksimal (Haryanto et al., 2025).

Berdasarkan hasil penelitian Arwildayanto (2017) ditemukan bahwa Partisipasi masyarakat konteks budaya huyula atau gotong royong dalam pembiayaan pendidikan belum sesuai harapan berada pada angka 57,59% atau kategori kurang baik. Sehingga menjadi pekerjaan pengelola pendidikan di SD, SMP berupaya mencari solusi agar terjadi penguatan partisipasi, kepedulian dan empati masyarakat dan orang tua terhadap kegiatan dan pembiayaan pendidikan di sekolah. Menurunnya partisipasi masyarakat dan orang tua siswa terhadap kegiatan dan pembiayaan pendidikan sekolah, menjadi perhatian kita semua untuk mencari solusi. Seperti yang diharapkan Syaiful Sagala (2009: 246), yang menyatakan masyarakat itu merupakan pemilik sekolah, dan sekolah ada karena masyarakat. Dengan demikian hubungan saling ketergantungan yang bisa memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan kegiatan dan pembiayaan pendidikan di sekolah seperti memiliki

hak untuk ikut dalam, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan dalam upaya penguatan mutu sekolah (Dr. arwildayanto et al., 2019).

Hasil penelitian Devrinawati Situmorang dkk. (2025) menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara keterlibatan komite sekolah dan kualitas keputusan manajerial dengan nilai korelasi $r=0.60$. Secara lebih rinci, keterlibatan komite sekolah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran (koefisien regresi $B=0.45$), pengurangan asimetri informasi ($B=0.52$), serta penyelarasan inkongruensi tujuan ($B=0.38$). Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa dukungan dari Dinas Pendidikan berperan sebagai variabel moderasi yang positif dan signifikan, yang berarti dukungan tersebut memperkuat hubungan antara keterlibatan komite sekolah dan kualitas keputusan manajerial. Kesimpulannya, keterlibatan aktif komite sekolah efektif untuk mengurangi masalah keagenan dan secara langsung meningkatkan kualitas keputusan manajerial di sekolah. Meskipun demikian, efektivitas peran komite sekolah ini sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan sistemik dari pihak Dinas Pendidikan (Devrinawati Situmorang, Suwito Eko Pramono, 2025).

Menurut Ririn Asparingga (2024) bahwa komite sekolah berperan aktif dalam membantu penyediaan sarana dan prasarana, mendukung kegiatan pengembangan kurikulum, serta berkontribusi dalam pelatihan bagi guru dan staf. Selain itu, kolaborasi antara komite sekolah, guru, dan orang tua turut memperkuat sistem pendidikan yang inklusif dan efektif, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Upaya peningkatan mutu melalui partisipasi komite ini terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa dan kepuasan orang tua terhadap sekolah. Dengan peran komite yang semakin strategis, upaya peningkatan mutu dapat terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan sehingga menghasilkan dampak positif jangka panjang bagi perkembangan siswa. Peran komite sekolah yang optimal diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui inovasi, kolaborasi, dan pengawasan berkelanjutan, guna mendorong tercapainya pendidikan berkualitas. (Ririn Asparingga, 2023)

Bahkan Rahmawati M, dkk (2025) menunjukkan bahwa komite sekolah memainkan peran penting sebagai Pemberi Pertimbangan (Advisory Agency), Pendukung (Supporting Agency), Pengontrol (Controlling Agency), dan Mediator (Executive) dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peran-peran tersebut mencakup pemberian masukan strategis, dukungan sumber daya, pengawasan akuntabilitas, dan jembatan komunikasi antara sekolah dan masyarakat (M et al., 2025).

Untuk itu, sekolah sebagai institusi pendidikan, menyiapkan wadah bagi masyarakat di sekitarnya untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan. Peran serta masyarakat ditampung dalam sebuah badan yang dinamakan komite sekolah. Memaksimalkan peran serta kontribusi komite sekolah dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan di sekolah sangat diperlukan (Mutia et al., 2025). Salah satu kegiatan yang direncanakan adalah melakukan

pelatihan (workshop) dan penguatan peran dan fungsi komite sekolah dalam kemitraan yang harmoni antara sekolah, masyarakat dan orang tua siswa di Kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan pendidikan, terutama terkait pemerataan kualitas dan partisipasi masyarakat. Sekolah-sekolah di wilayah ini masih membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam mengembangkan kemitraan yang produktif dengan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penguatan peran komite sekolah menjadi sangat penting sebagai strategi untuk meningkatkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dunia usaha, dan masyarakat luas.

Tujuan dari pengabdian masyarakat tentang penguatan peran komite sekolah dalam kemitraan sekolah dan masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Peran dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pendidikan di Bangkalan. Untuk itu perlu dilakukan upaya strategis meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan melalui pendekatan budaya huyula atau gotong royong. Salah satu bentuk rekayasa sosial yang dilakukan adalah meningkatkan peran komite sekolah dan orang tua siswa. Bentuknya melalui pembentukan forum komunikasi komite SD dan SMP Se-Kabupaten Bangkalan. Forum ini menjadi ajang berbagi pengalaman, berbagi kesuksesan dari sekolah-sekolah yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dalam penguatan mutu dan kualitas pendidikan di Bangkalan. Adapun tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan berupa pelatihan (workshop) Penguatan Peran Komite Sekolah dalam Kemitraan Sekolah dan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan, diantaranya adalah:

1. Memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang konsep dan peran komite sekolah mendukung perbaikan mutu layanan pendidikan di sekolah
2. Memberikan pemahaman tentang strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan di sekolah
3. Menginventarisir berbagai kelemahan, keunggulan, hambatan dan peluang yang dihadapi komite Sekolah Se-Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
4. Menyamakan persepsi tentang kemitraan sekolah dan masyarakat sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawab bersama dalam penyelenggaraan pendidikan.
5. Memberikan pemahaman tentang pentingnya peran komite sekolah melakukan monitoring pemanfaatan dana program dan ukuran keberhasilan kegiatan pendidikan

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara sekolah dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Penguatan kapasitas komite sekolah bukan hanya akan berdampak pada peningkatan tata kelola sekolah, tetapi juga pada

tumbuhnya budaya partisipatif dan kolaboratif dalam pembangunan pendidikan daerah.

B. METHOD

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di beberapa sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Bangkalan, dengan melibatkan pengurus Komite Sekolah, kepala sekolah, serta perwakilan tokoh masyarakat dan orang tua siswa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama tiga bulan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Tahap Persiapan, Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk menentukan sekolah sasaran dan peserta kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan survei awal untuk mengetahui kondisi aktual peran komite sekolah dan bentuk kemitraan yang sudah berjalan.
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan utama meliputi: *Workshop* dan Pelatihan tentang peran, fungsi, dan regulasi komite sekolah (mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016), Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh komite sekolah dalam menjalankan kemitraan dengan masyarakat, Pendampingan dan Simulasi penyusunan program kemitraan sekolah-masyarakat berbasis kebutuhan lokal, Monitoring dan Evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan dan tindak lanjut dari peserta.
3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut, Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner terhadap peserta untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kemampuan mereka setelah kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam merancang rekomendasi kebijakan bagi pihak sekolah dan pemerintah daerah (Moleong, 2009).

C. RESULT AND DISCUSSION

Result

Pelaksanaan kegiatan penguatan peran komite sekolah di Kabupaten Bangkalan menunjukkan hasil yang positif dan signifikan dalam beberapa aspek berikut:

a. Peningkatan Pemahaman dan Kompetensi Komite Sekolah

Salah satu hasil paling menonjol dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman anggota komite sekolah terhadap peran dan fungsi kelembagaan mereka. Sebelum kegiatan dilaksanakan, hasil survei awal menunjukkan bahwa lebih dari 60% anggota komite sekolah di beberapa sekolah sasaran belum memahami secara utuh isi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Banyak dari mereka menganggap komite hanya berfungsi sebagai pengumpul dana atau sekadar pelengkap administrasi sekolah.

Melalui workshop dan pelatihan interaktif, peserta tidak hanya diberikan pemahaman konseptual tentang fungsi komite, tetapi juga diajak menganalisis kasus-kasus nyata di sekolah mereka. Pendekatan andragogis (pendidikan orang

dewasa) digunakan agar peserta lebih aktif berbagi pengalaman dan merefleksikan praktik yang selama ini dilakukan.

Setelah kegiatan, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, dengan rata-rata skor peningkatan sebesar 82% dibanding sebelum pelatihan. Peserta mulai mampu menjelaskan empat peran utama komite sekolah, yaitu, Pemberi pertimbangan/*advisory agency*, Komite berperan dalam memberi masukan terhadap kebijakan sekolah., Pendukung/*supporting agency*, Komite membantu dalam mobilisasi sumber daya sekolah, baik berupa tenaga, dana, maupun gagasan, Pengontrol/*controlling agency*, Komite ikut memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, Mediator/*mediating agency*, Komite menjadi jembatan komunikasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

b. Penguatan Kemitraan Sekolah dan Masyarakat

Sebelum kegiatan dilaksanakan, hubungan antara sekolah dan masyarakat di sebagian besar lokasi masih bersifat formal dan terbatas pada kegiatan tertentu seperti rapat penerimaan siswa baru, pengumpulan sumbangan, atau perayaan sekolah. Setelah kegiatan pengabdian, pola kemitraan mulai menunjukkan perubahan menuju kolaborasi yang lebih produktif.

Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), komite sekolah bersama kepala sekolah dan perwakilan masyarakat diajak untuk mengidentifikasi potensi lokal serta peran masing-masing pihak dalam mendukung sekolah. Hasilnya, terbentuk sejumlah inisiatif kemitraan berbasis kebutuhan lokal. Kemitraan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah tidak lagi menjadi entitas yang bekerja sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem sosial masyarakat. Menurut model *Community-Based Education* (CBE), partisipasi masyarakat yang aktif akan memperkuat rasa memiliki terhadap sekolah (*sense of belonging*), yang pada gilirannya meningkatkan keberlanjutan program pendidikan.

c. Perubahan Sikap dan Pola Pikir Pengurus Komite Sekolah

Sebelum kegiatan pengabdian, banyak pengurus komite sekolah yang masih bersikap pasif karena merasa tidak memiliki kapasitas atau kewenangan yang cukup untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah. Namun, melalui pendekatan pelatihan partisipatif dan diskusi reflektif, peserta mulai memahami bahwa keberadaan komite bukan sekadar simbol, melainkan elemen penting dalam tata kelola pendidikan yang baik (*good school governance*).

Setelah pelatihan, muncul perubahan positif dalam perilaku, Komite mulai aktif hadir dalam rapat perencanaan sekolah dan ikut memberikan masukan terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Komunikasi antara komite dan kepala sekolah menjadi lebih terbuka dan transparan. Beberapa komite bahkan membentuk subtim kemitraan masyarakat untuk mengelola kegiatan sosial, seperti pengumpulan dana sukarela untuk siswa kurang mampu.

Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari pola top-down menjadi kolaboratif, di mana sekolah dan komite bekerja sejajar sebagai mitra. Secara sosial, hal ini

menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama antara masyarakat dan lembaga pendidikan.

d. Inovasi Kemitraan Berbasis Potensi Lokal

Kegiatan pengabdian juga mendorong munculnya berbagai inovasi kemitraan yang berakar pada potensi lokal masyarakat Bangkalan. Beberapa sekolah memanfaatkan potensi lingkungan sekitar untuk menciptakan kegiatan produktif, seperti, Pembuatan kebun edukatif sekolah yang melibatkan warga dalam penanaman sayuran organik, hasilnya dimanfaatkan untuk kantin sehat siswa, Pengembangan program literasi berbasis budaya lokal Madura, di mana siswa dan orang tua bersama-sama menulis dan membaca cerita rakyat daerah, Kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai lokal.

1. Inovasi tersebut memperkuat identitas lokal sekaligus meningkatkan relevansi pendidikan. Perlunya pembentukan Forum Komunikasi Komite Sekolah Kabupaten Bangkalan sebagai wadah berbagi praktik baik dan sinergi antar sekolah.
2. Integrasi pelatihan serupa ke dalam program rutin dinas pendidikan.
3. Pemberian penghargaan (reward) bagi komite sekolah yang aktif dan inovatif dalam membangun kemitraan dengan masyarakat.

terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk gotong royong dan dukungan moral juga menumbuhkan solidaritas sosial yang tinggi.

e. Tantangan dan Keberlanjutan Program

Meski hasil kegiatan cukup menggembirakan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pengurus komite sekolah, karena sebagian besar bekerja secara sukarela, Kurangnya dukungan sistematis dari dinas pendidikan untuk program pendampingan berkelanjutan, Perbedaan tingkat motivasi antar sekolah, sehingga hasil penguatan tidak seragam.

Untuk menjaga keberlanjutan program, tim pengabdian merekomendasikan: Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas komite sekolah tidak hanya meningkatkan efektivitas tata kelola pendidikan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara sekolah dan masyarakat. Pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal terbukti efektif untuk menggerakkan perubahan perilaku dan menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bangkalan.

Discussion

a. Jadwal Kegiatan Program

Pelaksanaan kegiatan pelatihan (*workshop*) atau Focus Group Discussion (FGD) penguatan peran dan fungsi komite sekolah dalam kemitraan yang harmoni antara sekolah, masyarakat dan orang tua siswa di Kabupaten Bangkalan dilaksanakan hari Senin tanggal 6 Maret 2025 di Aula dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga didukung oleh mahasiswa jurusan manajemen pendidikan, sebagai pelaksana kegiatan Hal ini menjadi bagian dari pembelajaran untuk mengorganisir acara yang mendatang pihak eksternal. Dari kegiatan Penguatan peran komite) yang dihadiri 40 Komite Sekolah dapat disimpulkan pentingnya dibentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah (FK2S) Se Kabupaten Bangkalan.



Gambar 1: Pembukaan acara pendampingan

b. Materi Pelatihan

Adapun kegiatan pelatihan (*workshop*) Penguatan Peran Komite Sekolah dalam Kemitraan Sekolah dan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan dilaksanakan dalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Tugas pokok dan fungsi serta penguatan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah

Komite Sekolah, menurut Zamroni dalam Ahmad Sayuti (2022) merupakan organisasi non formal yang dimiliki sekolah, sebagai wujud partisipasi orang tua siswa atau wali murid dan masyarakat. (Kemendiknas, Nomor 004/U/ 2002). Dasar hukum Pembentukan Komite Sekolah, kemudian disempurnakan dengan Peratiran Pemerintah No. 17 Tahun 2010 dilanjutkan dengan penyempurnaan melalui Permen No. 75 Tahun 2016 tentang Tentang Komite Sekolah (Sayuti, 2022).

Pembentukan Komite Sekolah juga diwadahi dalam pasal 56 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dari ayat 1 sampai 4. disebutkan, bahwa "Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam penguatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan".

Ada tiga bagian penting yang bisa diupayakan dalam pemberdayaan Komite Sekolah, yaitu: (1) Penguatan kelembagaan Komite Sekolah; (2) Penguatan kemampuan organisasional Komite Sekolah; dan (3) Penguatan wawasan kependidikan pengurus Komite Sekolah (Depdiknas, 2006).

Kelahiran Komite Sekolah sebagai wadah peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan merupakan salah satu implikasi dari otonomi pemerintahan pada umumnya dan otonomi pendidikan pada khususnya. Salah satu karakteristik manajemen berbasis sekolah tidak lain adalah pelibatan peran serta orangtua dan masyarakat dalam

pengambilan kebijakan, program, dan kegiatan di sekolah. Pelaksanaan peran dan fungsi dari Komite Sekolah pada saat ini belum sepenuhnya mendukung upaya penguatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu upaya pemberdayaan Komite Sekolah terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program, diantaranya (1) seminar Dewan Pendidikan, (2) pemberian subsidi stimulant, (3) pemilihan Komite Sekolah, (4) lokakarya dan kegiatan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut mengembangkan standar kinerja Komite Sekolah digunakan sebagai indikator-indikator keberhasilan peran dan fungsi lembaga ini (Ririn Asparingga, 2023).

Dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Propernas 2000–2004). Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*Community-based participation*) dan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*) (Gunawan, 2021).

Komite sekolah atau madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam penguatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Keberadaan komite sekolah terkadang terbentur beberapa keterbatasan dan hanya dijadikan sebagai formalitas untuk melengkapi persyaratan administrasi sekolah. Pihak sekolah terkadang merasa terintimidasi dengan adanya komite sekolah. Bahkan pandangan orang tua masih menganggap bahwa komite sekolah hanya sebagai BP3 yang hanya menarik dana dari orang tua siswa. Tugas komite sekolah tidak semata memberikan sumbangan dana bagi sekolah tetapi juga berperan secara luas dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Peran komite sekolah juga tidak terlalu jauh mencampuri secara teknis manajerial sekolah. Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan komite sekolah adalah sebagai berikut:

- a) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan

pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan.

- b) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- c) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Untuk menjalankan perannya itu, komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: Kebijakan dan program pendidikan, Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS/RKAS), Kriteria kinerja satuan pendidikan, Kriteria tenaga kependidikan, Kriteria fasilitas pendidikan, dan Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- e) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung penguatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- g) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Sedangkan berkenaan dengan aturan kepengurusan komite sekolah dijelaskan dalam Pasal 197, sebagai berikut :

- a) Anggota komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur Orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen) Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), dan Pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- b) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- c) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila: Mengundurkan diri, Meninggal dunia, atau tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d) Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan;
- e) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan;
- f) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- g) Anggota, sekretaris dan ketua komite sekolah/madrasah ditetapkan oleh kapal sekolah.

Sedangkan Fungsi dan Tugas Pokok Komite Sekolah adalah sebagai:

- Memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Aspek ini, menjalankan enam fungsi manajemen pendidikan yaitu: pengelolaan kurikulum dan pengajaran; memberi masukan tentang kurikulum muatan lokal;
- memberi pertimbangan tentang pelajaran tambahan; memberi pertimbangan tentang norma kenaikan kelas dan mutasi siswa; bersama sekolah ikut merencanakan penguatan mutu dan pengembangan akademik; member masukan tentang program pembelajaran dan evaluasi; bersama sekolah membuat visi, misi, kebijakan dan program pendidikan dalam menjalankan tugas pokoknya;
- Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Aspek ini, menjalankan enam fungsi manajemen pendidikan yaitu: (1) pengelolaan kurikulum dan pengajaran. Tugasnya antara lain: merespon keputusan pemerintah tentang kurikulum nasional dan lokal; (2) pengelolaan ketenagaan, yaitu: memobilisasi pegawai (guru/non guru) swasta; memberi penghargaan pegawai yang berprestasi; dan memberi dukungan kepada kepala (3) pengelolaan kesiswaan, antara lain: memobilisasi calon siswa yang bermutu; dan ikut memutuskan pemberian hukuman dan ganjaran bagi siswa tertentu. (4) pengelolaan keuangan: memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan; mengkoordinasi dukungan terhadap anggaran sekolah; mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran sekolah; dan (d) menyelenggarakan rapat RAPBS bersama kepala. (5) pengelolaan sarana dan prasarana, yaitu: memobilisasi bantuan sarana dan prasarana; mengkoordinasikan bantuan sarana dan prasarana; dan mengevaluasi dukungan bantuan sarana dan prasarana. (6) pengelolaan hubungan

masyarakat, terkait: menyelenggarakan pertemuan wal murid dan tokoh masyarakat.

- Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan haluan pendidikan di satuan pendidikan. Meliputi: (1) pengelolaan kurikulum dan pengajaran: memantau penyusunan jadwal, program pembelajaran dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kenaikan kelas dan mutasi siswa; dan memantau implementasi kebijakan pemerintah tentang kurikulum dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. (2) Pengelolaan ketenagaan; memantau pelaksanaan penerimaan murid baru; memantau kegiatan ekstra kurikuler; dan memantau kegiatan bimbingan dan penyuluhan. (3) Pengelolaan kesiswaan: memantau jalannya manajemen kepala pada aspek personalia (guru/non guru) mulai dari pengangkatan, pembinaan hingga pemberhentian, pemberian ganjaran dan sanksi, penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah; menilai kinerja kepala dan wakil kepala sekolah; dan mengkaji laporan pertanggungjawaban kepala sekoah. (4) Pengelolaan keuangan, yaitu: mengontrol penggunaan dana dari wali murid dan masyarakat: dan meminta keterangan kepala sekolah tentang penggunaan dana dari pemerintah. (5) Pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain: mengontrol kondisi sarana dan prasarana pendidikan dari segi kuantitas maupun kualitas; dan meminta laporan/keterangan kepala sekolah tentang pengelolaan sarana/prasarana yang berasal dari dana masyarakat, wali murid maupun pemerintah. (6) Pengelolaan hubungan masyarakat,yaitu: memantau jalannya hubungan sekolah dengan masyarakat (keluarga pegawai sekolah, wali murid, tetangga sekolah.
- Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat disatuan pendidikan (Depdiknas, 2002: P.33). Aspek ini, menjalankan dua fungsi manajemen pendidikan yaitu: (1) membangun komunikasi dengan pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka penganggaran pendidikan melalui APBD dan APBN; (2) membangun komunikasi dengan pihak dunia usaha dalam rangka mencari partisipasi finansial dan menerima out put pendidikan; dan (3) membangun komunikasi dengan masyarakat luas dan wali murid untuk meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pendidikan (Depdiknas, 2002: P.22).



Gambar 2: Pelaksanaan workshop

2. Komite Berperan Membangun Kemitraan Sekolah dan Masyarakat demi Kualitas Layanan Pendidikan di Sekolah

Umumnya kegiatan kemitraan adalah berupa penyediaan sumber daya dan sumber dana pendidikan, pendampingan pengerjaan tugas, dan dukungan langsung di ruang kelas bersama guru. Jika diklasifikasikan, ada dua bidang partisipasi masyarakat dan orang tua dalam komite sekolah bisa dikelompokkan dalam 2 ranah kemitraan, yaitu akademik dan non akademik. Anderson (1998: 589) menyatakan bahwa kemitraan masyarakat dan orang tua siswa bersama sekolah bisa dilakukan dalam beberapa hal : 1. Tata kelola sekolah dan pengambilan keputusan baik dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan, 2. Penataan untuk terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan dan standar mutu yang diharapkan. 3. Kurikulum dan implementasinya di kelas. 4. Bantuan terhadap Pekerjaan Rumah atau tugas lainnya (Mutia et al., 2025).

Kemitraan dapat dijalin melalui pertemuan langsung (tatap muka), di sekolah, di rumah, atau bahkan di tempat kerja orangtua, asalkan tempat yang dipilih merupakan lokasi yang nyaman bagi kedua belah pihak. Kegiatan kemitraan komite seperti ini kiranya dapat dipertimbangkan sebagai bagian integral dengan kegiatan sekolah lainnya, sehingga ada pengaturan alokasi waktu yang memperhatikan pula jam kerja pegawai pada umumnya. Komunikasi yang dijalin juga hendaknya disadari sebagai bagian penting dari pola pengasuhan dan penyelenggaraan pendidikan yang menyenangkan, sehingga masyarakat dan orang tua berkomitmen untuk bertemu dengan kepala sekolah, guru, tata usaha secara rutin di waktu-waktu yang telah ditentukan. Di negara maju, kemitraan antara masyarakat dan orang tua siswa dengan dibangun secara formal. Komite sekolah atau dewan kemitraan ini didirikan untuk menciptakan komunikasi yang lebih erat di antara orangtua/keluarga, sekolah dan masyarakat, mereka bertemu sebulan dalam agenda mengingatkan dan mengundang orangtua akan peringatan hari-hari nasional atau kegiatan lainnya yang yang membutuhkan partisipasi mereka sebagai orangtua, contohnya kegiatan palang merah dan HUT kemerdekaan. Orangtua dan sekolah juga diingatkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan kalangan masyarakat khususnya tokoh masyarakat senior, wujud nyatanya adalah sekolah memiliki nama dan alamat lengkap penduduk-penduduk yang ada di sekitar sekolah adalah contoh kegiatan kemitraan yang harmoni.

Komite, Orangtua, sekolah dan pihak kepolisian juga bisa bermitra dengan cara mengadakan pembelajaran tentang keterampilan berjalan di sekitar lalu lintas dengan aman. Metode yang ditempuh adalah anak-anak diminta berbaris dan berjalan mulai dari sebuah persimpangan sampai tiba di sekolah, sedangkan orangtua yang menyertai berjalan pada barisan yang khusus untuk para orangtua. Sepanjang perjalanan ada polisi dan guru yang mendampingi dan

memberikan pelajaran tentang keterampilan tersebut. Ide ini sangatlah baik mengingat tidak hanya memberikan pengetahuan penting tentang bagaimana berjalan di sekitar jalan raya yang riskan bagi anak-anak namun juga mentransfer kesadaran anak-anak untuk hidup sehat dan bugar melalui berjalan kaki. Kiranya ini bisa menjadi alternatif cara membuat lingkungan luar sekolah menjadi tempat yang lebih aman bagi anak-anak sekolah dan masyarakat sekitar. Jika kemitraan ini berjalan dengan harmoni, tentu kita yakin dan optimis kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan akan mudah dipenuhi.

3. Membangun Sinergitas (Kemitraan) Masyarakat dan Sekolah melalui Jejaring Komite Sekolah

Untuk membangun sinergitas atau kemitraan yang harmoni antara sekolah dan masyarakat serta orang tua siswa adalah dengan cara membangun jejaring atau forum komunikasi komite sekolah. Forum ini sebagai ajang komunikasi, berbagi ide, pengamalan, gagasan, dan kepedulian dalam membantu sekolah. Untuk itu di Kabupaten Bangkalan akan direncanakan melalui pengabdian masyarakat ini akan dibentuk jejaring atau forum komunikasi komite sekolah SD SMP se Kabupaten Bangkalan. Dengan harapan akan terbangun kesadaran kolektif akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan biaya dalam penguatan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan harapan semua pihak.

c. Skenario Kegiatan Pelatihan

1. Brainstorming

Pada tahapan ini, pemateri akan menggali informasi kepada peserta mengenai kondisi di sekolahnya masing-masing dan berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala sekolah, orang tua dan masyarakat. Tahapan ini pula mencoba menggali pengetahuan konsep peserta tentang tugas pokok dan fungsi komite sekolah. Hal ini dilakukan untuk melakukan *need assessment* dalam menyiapkan materi dan model pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta sehingga workshop yang dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya.



Gambar 3: Diskusi dan Tanya Jawab

2. Penyampaian Materi

Pada tahapan ini, pemateri akan menyampaikan beragam materi tentang konsep dan peran komite sekolah mendukung perbaikan mutu layanan

pendidikan di sekolah, strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan di sekolah, mengelaborasi kelemahan, keunggulan, hambatan dan peluang yang dihadapi Komite Sekolah Se-Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, strategi membangun kemitraan sekolah dan masyarakat sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawab bersama dalam penyelenggaraan pendidikan, pentingnya peran Komite Sekolah melakukan monitoring pemanfaatan dana program dan ukuran keberhasilan kegiatan pendidikan. Menginisiasi terbentuknya Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) SD dan SMP se Kabupaten Bangkalan

3. *Focus Group Discussion (FGD)*

Pada tahapan ini, para peserta yang diundang adalah perwakilan Komite Sekolah SD dan SMP masing-masing Kecamatan 5-6 sekolah. Pada tahapan ini, akan dipandu oleh moderator yang nantinya akan membagikan beberapa topik atau masalah yang diangkat dari materi yang disampaikan sebelumnya. Semua peserta diberikan kesempatan menyampaikan masalah dan harapannya tentang Komite Sekolah, sekaligus tanggapan terhadap rencana pembentukan forum komunikasi Komite Sekolah SD, SMP se Kabupaten Bangkalan. Masing-masing kabupaten akan dipilih satu format untuk membentuk FKKS Kabupaten Bangkalan sekaligus mempersentasikan hasil diskusi dan kajiannya dihadapan forum FGD dan akan mendapat respon dan pendalaman dari peserta lainnya.

d. Manfaat Pendampingan

Adapun kegunaan dari program pelatihan penguatan peran Komite Sekolah dalam kemitraan sekolah dan masyarakat, antara lain; Terciptanya sinergitas perguruan tinggi dengan sekolah dalam upaya membangun kemitraan yang harmoni antara masyarakat, orang tua siswa dan sekolah, Terciptanya iklim sekolah yang kondusif sehingga mampu lebih produktif dan inovatif dalam kemitraan yang harmoni antara sekolah dan masyarakat, Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dan orang tua siswa dalam penyelenggaraan dan pembiayaan guna meningkatkan mutu layanan di sekolah, Komite, masyarakat dan orang tua siswa berperan aktif merencanakan, melaksanakan program, dan monitoring layanan sekolah., Komite sekolah ruang dan kesempatan dapat melakukan monitoring terhadap pemanfaatan dana program dan ukuran keberhasilan kegiatan layanan pendidikan di sekolah, Dapat terbentuknya forum komunikasi Komite Sekolah SD, SMP se Kabupaten Bangkalan, sebagai media komunikasi antar Komite Sekolah berbagi pengalaman, berbagi program dan cara kerja yang efektif serta efisien dalam memainkan peran strategisnya sebagai mitra sekolah.

D. CONCLUSION

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memperkuat kapasitas dan peran strategis Komite Sekolah di Kabupaten Bangkalan. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman, kolaborasi, dan inovasi kemitraan sekolah-masyarakat. Sinergi antara sekolah, Komite, dan masyarakat terbukti mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang partisipatif,

transparan, dan berkelanjutan. Diharapkan model penguatan peran komite sekolah ini dapat direplikasi di daerah lain sebagai upaya kolektif dalam meningkatkan mutu pendidikan berbasis komunitas.

E. ACKNOWLEDGE

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, atas dukungan dan fasilitasi selama pelaksanaan kegiatan;
2. Kepala Sekolah dan Pengurus Komite Sekolah di sekolah-sekolah mitra yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan;
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) universitas pelaksana, atas dukungan pendanaan dan koordinasi kegiatan;
4. Rekan-rekan dosen dan mahasiswa pendamping, atas kerja sama, dedikasi, serta kontribusi dalam pelaksanaan workshop dan pendampingan lapangan.

Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam memperkuat kemitraan antara sekolah dan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pendidikan di Kabupaten Bangkalan.

F. REFERENCES

- Devrinawati Situmorang, Suwito Eko Pramono, A. Y. (2025). PENGARUH KETERLIBATAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP KUALITAS KEPUTUSAN MANAJERIAL DI SEKOLAH MENENGAH SWASTA KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL, KOTA BANDUNG. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(September), 240–253.
- Dr. arwildayanto, M. P., Dr. nina lamatenggo se, M. P., & warni tene sumar S.Pd., M. P. (2019). Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan. In *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* (Vol. 1).
- Gunawan, F. X. C. (2021). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Mutunggeding Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 640–645. <https://www.dinastirev.org/JMPIS/article/view/618%0Ahttps://www.dinastirev.org/JMPIS/article/download/618/386>
- Haryanto, S., Rohani, E., & Astuti, E. D. (2025). Penguatan Kapasitas Komite Sekolah untuk Meningkatkan Peran Aktifnya dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Wonosobo, Jawa Tengah. *JOURNAL OF PHILANTHROPY: The Journal of Community Service*, 3(1), 32–41. <https://doi.org/10.58353/jop.v3i1.246>
- M, R., Arfin, A., & Ahmad, M. (2025). Kontribusi dan Strategi Komite Sekolah sebagai Pilar Pengembangan Mutu Pendidikan. *Journal of Leadership, Management and Policy in Education*, 2(2), 104–113. <https://doi.org/10.51454/jlmpedu.v2i2.721>
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutia, F., Hambali, & Muhammad Isa. (2025). Peran Komite Sekolah dalam Pengambilan Kebijakan di SD Negeri 5 Banda Aceh. *Journal Tunas Bangsa*, 12(1), 43–58. <https://ejournal.bbg.ac.id/tunasbangsa>

- Nababan, M. L., Lumban Gaol, N. T., & Agustina, W. (2023). Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada Era 4.0. *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud*, 5(2), 84–95. <https://doi.org/10.33387/cahayapd.v5i2.6879>
- Permendikbud RI No 75, 2016. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–11.
- Ririn Asparingga. (2023). Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam. *REFERENSI ISLAMIKA: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 29–39. <https://doi.org/10.61220/ri.vol1iss1.0234>
- Sayuti, A. (2022). PERAN KOMITE DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN. *Jurnal Mubtadiin*, 8(01), 2003–2005.